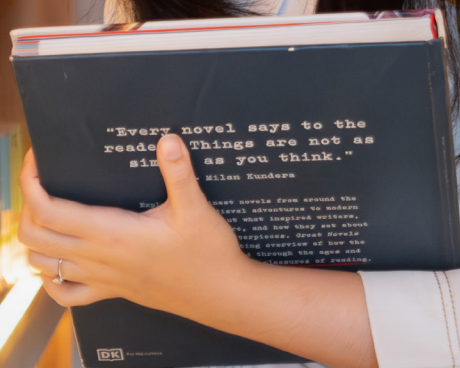


TC MEDIA

I N S P I R A S I U N T U K B E R S I N E R G I



TERUS BELAJAR



COVER STORY

Kami mengambil foto di Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, yang berlokasi di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat. Perpustakaan yang berdiri pada 30 Mei 1977 ini diresmikan kembali pada 7 Juli 2022. Fasilitas, layanan, dan sistemnya telah mengalami revitalisasi dan kini menjadi salah satu pusat literasi di kota Jakarta.

Cover

Model: Audrey Ruth Selena

Foto: Faisal Chairu

Terus Belajar

Sekretariat Pengadilan Pajak

Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat



Daftar Isi

3 Editorial

3 Infografis

6 Foto Kita

8 Lintas
Peristiwa

10 Izin Kuasa
Hukum
Elektronik

13 Keahlian
Kuasa Hukum

16 Pengadilan
Pajak &
Pendidikan

18 Magang
Kemenkeu

21 Mengapa
Sekolah Lagi

24 SobatPP
Berani

25 Bukti
Pemeriksaan
Persidangan

27 Tax Court
People's
Choice 2024

30 Tugas Belajar
Part 2

33 Ide Inovasi
Satu Shortlink

35 Si Taco #13
Terus Belajar

Diterbitkan oleh: Sekretariat Pengadilan Pajak. **Pengarah I:** Sekretaris Pengadilan Pajak Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak. **Penanggung Jawab:** Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi. **Redaktur Umum:** Kepala Subbagian Informasi dan Publikasi. **Redaktur Pelaksana:** Gilang Pratama. **Penyunting:** Rizki Damayanti, M. Hafizullah Lubis. **Desain Grafis dan Fotografer:** Faishal Chairu Noor, Ridwan Firmansyah, Ariyan Bayu Wijaya. **Tim Redaksi:** Gabriella Grace, Heru Nugroho, Mega Nurmalasari, Sukindar Ari Santoso Astris Dyah Perwita, Mutia Rizki, Felixita Novelia Christiana Dewi, Rahma Noor Fadhila, Risya Ayu, Audrey Ruth Selena, Rehana Harahap



setpp.kemenkeu.go.id



kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id



tcmedia_pp



SetPPKemenkeu



LAYANAN BEBAS BIAYA

**SELURUH LAYANAN DI PENGADILAN PAJAK TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN,
TERIMA KASIH UNTUK TIDAK MEMBERIKAN IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN
TERHADAP SELURUH PELAYANAN YANG DIBERIKAN PETUGAS KAMI.**

Terima kasih
dari hati,
tanpa
GRATIFIKASI

Tolak dan
Laporkan
Gratifikasi

**100%
FREE**



menggenggam asa pengetahuan



Saat ini dunia telah memasuki abad ke-21, lanskap pendidikan telah berubah secara drastis. Ruang kelas tradisional telah diperluas untuk mencakup kerangka pembelajaran daring, sumber daya digital interaktif, dan pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Evolusi ini telah memperluas jangkauan setiap orang untuk memperoleh akses terhadap pengetahuan dan mengurangi hambatan geografi dan status sosial ekonomi. Namun, dengan kemajuan ini muncul tanggung jawab untuk memastikan akses yang adil bagi semua, menjembatani kesenjangan digital dan mendukung beragam gaya dan kebutuhan pembelajaran.

Dalam perekonomian global yang didorong oleh kemajuan teknologi yang pesat, kebutuhan dalam bidang ranah ilmu pengetahuan semakin meningkat. Terlebih lagi, dengan keberadaan pihak penyedia beasiswa yang semakin beragam, setiap orang dari berbagai profesi melihat pendidikan tinggi laksana memetik buah dari pohonnya. Pendidikan tinggi dapat dicapai hanya dalam genggam tangan dengan tantangan yang semakin membutuhkan solusi. Dengan melakukan hal ini, akan tercipta pemberdayaan generasi masa depan yang tidak hanya untuk unggul secara akademis, tetapi juga untuk berkembang menjadi pemikir inovatif dan warga global yang bertanggung jawab.

Dalam edisi kali ini, TC Media mencoba untuk memberikan suguhan artikel terkait semangat untuk mengejar pendidikan dan dorongan untuk terus belajar. Beberapa cerita dari rekan-rekan di Sekretariat Pengadilan Pajak juga turut memberikan pengalamannya melanjutkan tugas belajar di negeri orang dengan suasana dan lingkungan yang baru. Tidak lupa pula, sajian mengenai transformasi administrasi Izin Kuasa Hukum dan bukti pemeriksaan dalam persidangan tidak boleh dilewatkan untuk dibaca.





Kunjungan Mahasiswa STAN

Foto
Faishal Chairu



Hari Kartini

Jakarta, 19 April 2024. Pengadilan Pajak mengadakan serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Kartini, yang jatuh pada hari Jumat, tanggal 21 April 2024. Peringatan dengan tema “Semangat Kartini Semangat Transformasi” ini mempromosikan budaya Indonesia dengan menggelar kegiatan berupa lomba yang diselenggarakan Yudikawati, yaitu lomba *Fashion Show*, lomba swafoto mengenakan pakaian adat daerah, lomba menghias tumpeng, dan kuis pengetahuan umum.

Teks Rehana | **Foto** Faishal



Acara Harlah Pengadilan Pajak

Jakarta, 26 April 2024. Selaras dengan era transformasi, Hari Lahir Pengadilan Pajak tahun ini diberi tema “Transformasi untuk Pengadilan Pajak yang Lebih Baik”. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara tahun ini disemarakkan dengan peluncuran Izin Kuasa Hukum Online, Grand Final lomba Family 100, dan penampilan dari pegawai baru Set. PP. Selain itu, acara juga diisi dengan seminar motivasi mengenai sinergi dan kolaborasi yang diberikan oleh Yohanes Supriyanto dari Pusdiklat PIM Magelang. Tidak lupa, apresiasi bagi seluruh elemen Pengadilan Pajak juga diberikan oleh pimpinan Pengadilan Pajak atas kinerja baik selama satu tahun belakangan.

Teks Odi | **Foto** Faishal



Sosialisasi Implementasi Ber-AKHLAK

Jakarta, 3 Mei 2024. Set. PP Pada Hari Jumat, 3 Mei 2024, Set. PP mengadakan kegiatan kolaborasi yang diawali dengan Sosialisasi Implementasi Ber-AKHLAK dalam Budaya Kementerian Keuangan oleh Change Agent Duta Transformasi. Acara kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dengan tema Peran Kita dalam Budaya Integritas yang disampaikan oleh Sekretaris Pengadilan Pajak. Rangkaian kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai Set. PP secara daring. Kemudian acara ditutup dengan kegiatan Workshop “Coaching and Counseling for Growth and Resilience” yang diikuti oleh seluruh pejabat administrator.

Teks Odi | **Foto** Faishal

Kunjungan Mahasiswa UNPAD

Jakarta, 8 Mei 2024. Pada tanggal 8 dan 15 Mei 2024, Set. PP menerima kunjungan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran. Sebanyak 79 mahasiswa bersama dosen pendamping disambut baik di Ruang Rapat Gedung F Lantai 6. Setelah penyambutan, mahasiswa mendapatkan materi mengenai Pengadilan Pajak dan Sistem Informasi e-Tax Court. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan proses modernisasi yang sedang terjadi di Set. PP dan membekali mahasiswa sebelum mengunjungi ruang sidang di akhir kunjungan.

Teks Odi | Foto Faishal



Sosialisasi e-Tax Court

Jakarta, 16 Mei 2024. Untuk meningkatkan awareness mengenai e-Tax Court, Set. PP melanjutkan sosialisasi ke Danny Darussalam Tax Center (DDTC). Sebanyak 52 peserta dari kuasa hukum dan tim mengikuti sosialisasi yang dibawakan oleh Aditya A. P. Nugroho dan Fery K. W. Yudiantyo. Materi yang diberikan mencakup proses bisnis dan teknis aplikasi. Antusiasme dari para peserta terasa dalam sesi diskusi. Kedepannya, semoga e-Tax Court dapat terus dikembangkan demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pengguna.

Teks Odi | Foto Faishal



Beralih ke Izin Kuasa Hukum Elektronik



Seiring dengan jumlah permohonan Izin Kuasa Hukum yang terus mengalami peningkatan signifikan selama tiga tahun terakhir, maka sejak tanggal 12 April 2024, Pengadilan Pajak melakukan transformasi proses pengajuan permohonan Izin Kuasa Hukum dari yang sebelumnya berbasis kertas menjadi elektronik.

Untuk dapat beracara di Pengadilan Pajak bagi orang perseorangan yang memperoleh kuasa untuk mewakili atau mendampingi para pihak yang bersengketa, maka dibutuhkan sebuah keputusan resmi dari Ketua Pengadilan Pajak. Keputusan resmi ini diberikan kepada perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk selanjutnya diberikan Izin Kuasa Hukum. Saat ini Persyaratan menjadi seorang kuasa hukum di Pengadilan Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 184/PMK.01/2017 dan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak. Sebelumnya, persyaratan tersebut diatur dalam PER-01/PP/2018.

Adapun dokumen yang harus dilampirkan dalam berkas permohonan terdiri dari:

1. daftar Riwayat Hidup;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan untuk lulusan perguruan tinggi di Indonesia atau fotokopi surat keputusan penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi di luar negeri yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
4. fotokopi dokumen yang menunjukkan Pemohon mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan dan cukai;
5. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
7. asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. pasfoto terakhir berwarna dan berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
9. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
10. pakta integritas; dan
11. fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak, dalam hal Pemohon merupakan orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak.

Semua dokumen tersebut harus dibuat dalam bentuk cetak sebelum diajukan. Berkas-berkas yang telah disampaikan atau tiba di Pengadilan Pajak akan diverifikasi kelengkapannya. Berkas-berkas yang telah dinyatakan lengkap selanjutnya akan diterbitkan keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum dan kartu sebagai tanda pengenal Izin Kuasa Hukum. Baik keputusan Ketua Pengadilan Pajak maupun kartu pengenal, keduanya akan dikirim melalui pos ke alamat korespondensi yang tertera dalam surat permohonan Izin Kuasa Hukum.

Seiring dengan jumlah permohonan Izin Kuasa Hukum yang terus mengalami peningkatan signifikan selama tiga tahun terakhir, maka sejak tanggal 12 April 2024, Pengadilan Pajak melakukan transformasi proses pengajuan permohonan Izin Kuasa Hukum dari yang sebelumnya berbasis kertas menjadi elektronik. Pergeseran tersebut dilakukan guna memberikan layanan Izin Kuasa Hukum yang lebih cepat dan mudah dan mewujudkan kepastian hukum serta transparansi proses bisnis Izin Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak.

Layanan Izin Kuasa Hukum berbasis elektronik ini dapat diakses dari laman setpp.kemenkeu.go.id pada menu 'IKH Online'.

Secara garis besar, dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan dalam pengajuan permohonan Izin Kuasa Hukum berbasis elektronik tersebut tidak jauh berbeda sebelumnya. Dokumen-dokumen yang sebelumnya dalam format cetak perlu dipindai untuk selanjutnya diunggah ke dalam aplikasi daring yang dapat diakses pada beranda laman resmi Sekretariat Pengadilan Pajak. Di samping itu, surat permohonan Izin Kuasa Hukum diubah dalam borang dimana pemohon layanan perlu mengisi data diri secara daring.

Oleh Karena layanan saat ini bersifat daring, pengajuan permohonan Izin Kuasa Hukum dapat

dilakukan dimana saja dan kapan saja meskipun tanggal pengajuan jatuh pada hari libur nasional. Disamping itu, hal yang perlu diingat oleh para pemohon ketika mengajukan layanan berbasis elektronik ini adalah pembubuhan meterai elektronik pada surat pernyataan dan pakta integritas. Format meterai yang dibubuhi wajib berupa meterai elektronik, bukan hasil pindaian meterai tempel.

Apabila diuraikan, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam pengajuan Izin Kuasa Hukum sesuai dengan PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak adalah salinan digital (*softcopy*) daripada:

1. Daftar Riwayat Hidup yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum;
2. kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau surat keputusan penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi di luar negeri oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia;
4. dokumen yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepastian dan cukai;
5. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku untuk keperluan permohonan Izin Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak;
8. pasfoto terbaru berukuran 4x6 cm, berwarna, berlatar belakang merah, posisi wajah menghadap lurus ke depan, dan berpakaian rapi dan sopan dengan menggunakan kemeja/jas/blazer;
9. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara

bermeterai elektronik (e-meterai) yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum;

10. pakta integritas bermeterai elektronik (e-meterai) yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum;
11. Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak, dalam hal Pemohon merupakan orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak;
12. Kartu Keluarga, dalam hal yang mengajukan permohonan adalah seorang istri yang pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya; dan
13. surat pernyataan bermeterai elektronik (e-meterai) yang menyatakan bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai aslinya dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum.

Setelah dokumen-dokumen tersebut disampaikan melalui laman pengajuan, pemohon akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik yang dikirim melalui alamat surel yang telah diisi. Keputusan Ketua, salinan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak, dan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum diterbitkan dalam waktu paling lama lima hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Adapun masa berlakunya Izin Kuasa Hukum berbasis elektronik adalah dua tahun sejak tanggal penerbitan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum, sama seperti pengajuan sebelumnya. Sementara itu untuk permohonan perpanjangan diajukan paling cepat tiga puluh hari kalender sebelum masa berlaku Izin Kuasa Hukum berakhir.

Teks: Hafiz



Kuasa Hukum

Dan Keahliannya Dalam Upaya
Mempercepat Penyelesaian Sengketa Pajak

*Secara normatif,
Kuasa Hukum
(Advokat) adalah
salah satu aparat
penegak hukum.*

Lemhannas

Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Sengketa Pajak yang ditangani oleh Pengadilan Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dalam upaya memberikan keadilan kepada para wajib pajak atau penanggung pajak yang mengajukan banding atau gugatan, Pengadilan Pajak menyelenggarakan persidangan pemeriksaan guna memperoleh fakta-fakta untuk mencari kebenaran materiil. Oleh karenanya, dalam persidangan, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para Pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para Pihak.

Pihak yang bersengketa yang mengikuti persidangan di Pengadilan Pajak, pada prinsipnya dapat hadir secara langsung dalam persidangan, tanpa perlu diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain. Namun demikian apabila dikehendaki, para Pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Khusus.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Pengadilan Pajak, untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Namun demikian, persyaratan dimaksud tidak diperlukan dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding atau Penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu.

Salah satu syarat khusus untuk dapat menjadi kuasa hukum berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut adalah mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-



undangan perpajakan. Kata pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti segala sesuatu yang diketahui, sedangkan keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu. Kedua kata tersebut mengarah pada kepandaian yaitu kemampuan seseorang dalam mengetahui dan menguasai suatu bidang ilmu, sehingga dalam hal ini untuk menjadi kuasa hukum Pengadilan Pajak, bidang ilmu yang harus dikuasai adalah ilmu tentang perpajakan. Persyaratan tersebut yang membedakan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dengan kuasa hukum pada pengadilan lainnya. Lantas, ilmu perpajakan seperti apakah yang harus dikuasai seorang kuasa hukum apabila yang bersangkutan akan mendampingi atau mewakili wajib pajak beracara di Pengadilan Pajak? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu proses persidangan di Pengadilan Pajak.

Pada Pengadilan Pajak, persidangan dilaksanakan untuk menggali fakta-fakta terhadap sengketa pajak yang diajukan pemohon yang akan digunakan Majelis Hakim dalam memutus sengketa pajak dimaksud. Pada proses persidangan di Pengadilan Pajak, tahapan dalam menggali fakta-fakta atas sengketa pajak dilakukan dengan menelusuri kronologis penerbitan ketetapan atau keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan. Fakta-fakta yang akan digali oleh Majelis Hakim berkaitan erat dengan upaya hukum apa yang diajukan yaitu banding atau gugatan. Sebagai contoh untuk sengketa banding,

Majelis akan menggali fakta untuk mencari kebenaran materiil terhadap objek yang disengketakan tidak terbatas hanya pada saat keputusan yang dibanding dimaksud diterbitkan namun dapat juga dilakukan sejak saat peristiwa terutangnya pajak terjadi, pada saat pelaporan pajak melalui *self assesment system*, hingga proses keberatan yang telah diajukan dan diputus oleh Terbanding. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dalam persidangan Pengadilan Pajak akan dilakukan secara komprehensif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak untuk dapat membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan.

Proses pemeriksaan dalam persidangan Pengadilan Pajak yang komprehensif inilah yang mengharuskan dimilikinya pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang mana menjadi salah satu syarat bagi orang perseorangan yang akan mendampingi atau mewakili para pihak beracara di Pengadilan Pajak untuk memiliki Izin Kuasa Hukum. Ketentuan mengenai tata cara permohonan Izin Kuasa Hukum lebih lanjut diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2024 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.

Untuk sengketa perpajakan termasuk di dalamnya sengketa pajak daerah, kuasa hukum yang akan memberikan pendampingan kepada wajib pajak dalam beracara di Pengadilan Pajak harus memiliki Izin

Kuasa Hukum Bidang Perpajakan sebagaimana diatur dalam PER-1/PP/2024. Dari persyaratan yang diatur dalam ketentuan tersebut diketahui bahwa syarat memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan tidak harus berasal dari pendidikan formal, melainkan juga bisa didapat dari pendidikan informal dan pengalaman bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan.

Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperoleh melalui pendidikan formal antara lain dapat dibuktikan dengan ijazah Sarjana atau Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, dan/atau perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi, dan ijazah Diploma III perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi, sedangkan Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperoleh dari pendidikan informal dapat dibuktikan dengan dokumen brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan, termasuk juga keahlian yang didapat dari pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan.

Untuk sengketa bidang kepabeanan dan cukai, karakteristik sengketanya sangat berbeda dengan sengketa pajak. Pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk sengketa kepabeanan adalah orang atau badan yang mendapat layanan kepabeanan. Pihak tersebut meliputi Importir, Eksportir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, Pengangkut, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, dan Perusahaan Jasa Titipan. Sedangkan untuk sengketa Cukai, pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah orang yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), yaitu meliputi pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran. Dengan demikian, pada sengketa kepabeanan dan cukai ini, baik subjek, objek maupun dasar hukum sengketa pajaknya memiliki kekhususan yang membedakan dengan sengketa pajak lainnya. Oleh karenanya, dalam upaya melindungi wajib pajak yang membutuhkan pendampingan dalam penyelesaian sengketa pajak terkait kepabeanan dan cukai, Pengadilan Pajak memberikan syarat khusus untuk pengajuan Izin Kuasa Hukum Bidang Kepabeanan dan Cukai

dimana pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan harus dibuktikan dengan dokumen berupa:

1. ijazah Diploma III kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
2. sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau
3. surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis kepabeanan dan cukai;

Dari persyaratan tersebut, sama halnya dengan keahlian di bidang perpajakan, pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai tidak harus berasal dari pendidikan formal, melainkan juga bisa didapat dari pendidikan informal dan pengalaman bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis kepabeanan dan cukai.

Pengetahuan yang luas dan keahlian yang harus dimiliki seorang kuasa hukum, pada dasarnya merupakan kebutuhan mendasar dalam beracara di Pengadilan Pajak, tidak hanya memahami mengenai hukum sebagaimana kuasa hukum pada peradilan umum, melainkan harus benar-benar memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang mendasari lahirnya sebuah keputusan/ketetapan yang dapat diajukan banding/gugatan ke Pengadilan Pajak. Hal ini diperlukan selain karena sengketa perpajakan bersifat khusus, juga dikarenakan sengketa perpajakan merupakan peristiwa yang mungkin dapat berulang pada masa dan/atau tahun pajak berbeda. Untuk itu, kuasa hukum yang mendampingi wajib pajak sudah seharusnya memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian di bidang perpajakan sesuai dengan bidang yang ditanganinya agar proses penyelesaian sengketa pajak berjalan lebih cepat, murah dan sederhana sehingga keadilan substansial yang diinginkan oleh wajib pajak dapat tercapai. Oleh karenanya Pengadilan Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong meningkatnya penerimaan negara.

Teks: Aniek Andriani

Keunikannya sebagai satu-satunya badan peradilan yang menangani sengketa perpajakan, menjadikan Pengadilan Pajak memiliki peranan cukup penting pada aspek pendidikan. Mahasiswa diploma hingga pascasarjana tidak sedikit yang menjadikan Pengadilan Pajak sebagai objek penelitian guna pemenuhan penyelesaian studi. Terlebih Pengadilan Pajak pun sangat terbuka dalam menerima permohonan mahasiswa, baik untuk keperluan penelitian, wawancara narasumber, ataupun kunjungan studi, dengan mekanisme yang sederhana dan mudah.

Pengadilan Pajak Sebagai Sumber Belajar

Prosedur permohonan untuk keperluan penelitian atau wawancara dilakukan dengan cara mengajukan permohonan berupa surat resmi dari lembaga atau universitas, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak. Proses permohonan ini memakan waktu kurang lebih satu hingga dua minggu, untuk kemudian dari fungsi terkait yaitu Subbagian Informasi dan Publikasi akan menghubungi pemohon melalui *Whatsapp* resmi Pengadilan Pajak guna melakukan konfirmasi lebih lanjut perihal data atau wawancara yang diperlukan. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024 ini, lebih dari lima puluh permohonan baik untuk penelitian maupun wawancara masuk ke Pengadilan Pajak dan telah ditindaklanjuti.

Berbicara mengenai keperluan wawancara untuk penelitian, rasio terbanyak narasumber yang dituju adalah hakim, yang umumnya merupakan permohonan dari mahasiswa yang tengah melakukan penelitian terkait penyelesaian sengketa perpajakan. Namun sejak munculnya sistem informasi e-Tax Court pada Juli 2023 lalu, semakin menambah khasanah proses penyelesaian sengketa perpajakan yang tentunya dapat lebih dieksplorasi lagi oleh para mahasiswa, sehingga selain hakim, kini tim pengembang e-Tax Court juga kerap menjadi narasumber yang dituju. Hal ini tentu memperluas tema yang dapat digali dari penelitian terkait Pengadilan Pajak, yang mulanya berfokus pada perkara penyelesaian sengketa atau terkait *transfer pricing*, kini mulai merambah ke pemanfaatan teknologi informasi pada penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian-penelitian itu pun, jika memang diperlukan, dapat diminta oleh Pengadilan Pajak sebagai dokumentasi, atau lebih lanjut, digunakan sebagai salah satu sumber *insight* dalam pengambilan kebijakan.



Sebagai gambaran, berikut beberapa judul penelitian yang menjadikan Pengadilan Pajak sebagai objek atau sumber penelitian:

1. Pengaturan dan Tantangan Penerapan Doktrin *Substance over Form* sebagai *General Anti-Avoidance Rule* dalam Pencegahan Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia;
2. Tinjauan terhadap Reformasi Hukum Pajak Melalui e-Tax Court di Indonesia;
3. Transformasi Sistem Penyelesaian Litigasi Sengketa Pajak melalui Jalur Mediasi;
4. Prediksi Putusan Pengadilan Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan menggunakan Metode *Light Gradient Boosting Machine* (Light GBM);
5. Analisis Penerapan E-Tax Court Ditinjau Dari Teori *Technology Acceptance Model* (TAM);
6. *Resolving Transfer Pricing Disputes in Indonesia*.

Pada sisi lain, peran Pengadilan Pajak sebagai sumber pembelajaran ini juga menjadi pemicu tumbuhnya kultur belajar yang sejalan dengan adanya implementasi *Learning Organization* sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pemelajar (*Learning Organization*) di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada dasarnya, *Learning Organization* ini ditujukan agar para pegawai dapat menciptakan kultur *non stop learning*, dimana organisasi secara sistematis memfasilitasi pemelajar agar mampu berkembang dan bertransformasi secara berkesinambungan guna pencapaian kinerja yang optimal.

Kunjungan ke Ruang Sidang

Selain keperluan penelitian, peran Pengadilan Pajak tidak terbatas hanya pada penyedia data dan wawancara saja, namun juga menyediakan fasilitas kunjungan langsung ke ruang sidang. Prosesnya pun sama dengan permohonan penelitian atau wawancara, yaitu dengan meminta izin melalui surat kepada Ketua Pengadilan Pajak. Pada prinsipnya, dikarenakan persidangan di Pengadilan Pajak bersifat terbuka untuk umum, maka Majelis biasanya memberikan izin bagi para mahasiswa untuk mengikuti jalannya persidangan, sepanjang terdapat permohonan

berupa surat dari lembaga atau universitas yang telah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Pajak. Apalagi, ditambah dengan adanya pelaksanaan sidang *online*, mahasiswa yang kesulitan untuk datang langsung ke gedung Pengadilan Pajak, dapat dengan mudah mengikuti jalannya persidangan melalui Zoom.



Tidak hanya sekadar berkunjung ke ruang sidang, namun para mahasiswa yang biasanya hadir dengan dosen pendamping ini juga diberikan fasilitas untuk mengikuti 'kelas singkat' dimana terdapat pemateri yang menjelaskan mengenai profil singkat, proses bisnis, dan informasi terkini mengenai penyelesaian sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak. Penyampaian materi ini biasanya dilakukan oleh Pembantu Sekretaris Pengganti, dan dilakukan sebelum kunjungan ke ruang sidang ataupun mengikuti sidang secara *online*. Hal ini tentunya semakin menambah wawasan para mahasiswa yang berkunjung, terlebih selalu ada diskusi menarik yang pemicunya justru dari para mahasiswa sendiri. Rasa penasaran yang meletup-letup, dapat dipenuhi dengan berdiskusi bersama pemateri.

Dengan terus memberikan kemudahan kepada para mahasiswa ataupun pemelajar lain dalam mengakses sumber belajar tersebut, semakin memperkuat peran Pengadilan Pajak yang senantiasa berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum pajak dan proses peradilan bagi masyarakat pada umumnya.

Teks: Mutia

Magang Kemenkeu

Mengintip Jantung Pengelolaan Keuangan Negara

Apakah Sobat PP mengetahui tentang program Magang Kemenkeu?

Berikut liputan tim TC Media tentang program yang berjalan serentak di seluruh kantor Kemenkeu di Indonesia ini.





Bagi Najwan Haviansha Bastari, mahasiswa Program Studi Perpajakan, Universitas Indonesia, magang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi sekadar mimpi akan tetapi sudah menjadi kenyataan. Pengalamannya selama dua bulan di Sekretariat Pengadilan Pajak membuka matanya tentang kompleksitas penanganan sengketa perpajakan di Indonesia. Prima, begitu ia biasa disapa, adalah satu diantara ratusan mahasiswa yang sudah mengikuti program Magang Kemenkeu. Program ini sudah dimulai sejak tahun 2021 dan dilaksanakan serentak di kantor Kemenkeu di seluruh Indonesia.

Lantas, apa yang istimewa dari program Magang Kemenkeu saat ini? Jika sebelumnya kegiatan magang di lingkungan Kemenkeu dilaksanakan dengan pengajuan yang bersifat *impromptu* dari mahasiswa kepada unit-unit kerja di Kemenkeu, maka kegiatan Magang Kemenkeu sejak tahun 2021 ini berbeda. Sejak terbitnya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-46/MK.1/2020 tentang Mekanisme Magang Mahasiswa/Mahasiswi Yang Dilaksanakan Di Lingkungan Kementerian Keuangan, kegiatan magang di lingkungan Kemenkeu dilaksanakan secara terpusat dan terstruktur. Semua informasi, usulan, dan

pelaksanaan kegiatan magang dipusatkan pada laman www.magangkemenkeu.go.id.

Perencanaan magang di Kemenkeu dimulai dengan penyusunan kebutuhan mahasiswa magang pada tiap unit kerja di seluruh Indonesia selama satu tahun mendatang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi jumlah kebutuhan peserta magang beserta kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Setelah itu, seluruh informasi kebutuhan akan dihimpun pada laman Magang Kemenkeu dalam bentuk pengumuman pembukaan magang di Kemenkeu yang dilakukan secara kuartalan. Calon peserta magang dapat melakukan registrasi dan pengajuan pendaftaran program magang pada laman Magang Kemenkeu. Beberapa dokumen pokok yang diajukan dalam proses pendaftaran antara lain, proposal magang, surat pengantar dari perguruan tinggi, daftar riwayat hidup, dan transkrip nilai terakhir.

Setelah masa pendaftaran berakhir, maka admin magang pada setiap unit kerja melakukan seleksi atas pendaftar magang. Informasi peserta magang yang diterima oleh unit akan disampaikan melalui

pengumuman terbuka di laman dan juga pada akun pendaftar magang. Setelah itu, kegiatan magang dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal magang masing-masing peserta. Keseluruhan proses ini dilakukan via laman Magang Kemenkeu, sehingga proses magang dari pendaftaran hingga pelaksanaan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Di luar kegiatan Magang Kemenkeu Reguler seperti yang dibahas sebelumnya, terdapat beberapa program magang khusus kerja sama Kemenkeu dengan kampus atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Diantara beberapa program tersebut adalah Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) serta Magang Berkonversi dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Program magang khusus ini memiliki kualifikasi peserta dan topik kegiatan magang yang lebih khusus dan *segmented*.

Sekretariat Pengadilan Pajak telah aktif turut serta dalam program Magang Kemenkeu sejak awal tahun 2021. Selain Prima yang sudah disebut sebelumnya, sudah puluhan mahasiswa dan mahasiswi yang diterima dan melaksanakan magang di Set. PP. Peserta magang di lingkungan Set. PP akan ditempatkan pada unit Sekretaris Pengganti yang menangani administrasi persidangan sengketa pajak. Kualifikasi untuk peserta magang Kemenkeu di Set. PP adalah mahasiswa/mahasiswi pada rumpun bidang ekonomi, manajemen, dan keuangan, khususnya perpajakan. Tugas para peserta magang ini antara lain menyusun produk administrasi persidangan seperti Risalah Sengketa Banding, Berita Acara Sidang, dan melakukan penyusunan berkas persidangan.

Set. PP sebagai satu-satunya organisasi yang menangani sengketa perpajakan di Indonesia tentunya memiliki peran, tugas, dan fungsi yang tidak dapat ditemui di tempat lainnya, khususnya yang terkait dengan persidangan. Oleh karenanya, peserta magang sangat terkesan dengan pengalamannya ikut serta dalam persidangan sengketa pajak. Vidia Alifia Indriani, mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya, mengatakan sangat terkesan karena bisa ikut andil dalam persiapan persidangan dan pelaksanaan persidangan baik secara elektronik maupun tatap muka. Senada dengan yang disampaikan oleh Nararya Prima Baswara, mahasiswa Perpajakan Universitas

Indonesia, ia sangat menyukai berada pada ruang persidangan dan menyimak jalannya persidangan.

Pengalaman selama magang tak selalu mulus. Keharusan untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan antara lingkungan kerja dari kelas-kelas perkuliahan menjadi hal yang tak terelakkan bagi Calista Mawarni, mahasiswi asal Universitas Gunadarma. Namun, ia tak gentar, ia belajar dari tantangan tersebut dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk berkembang. Selain itu, tantangan untuk mempelajari sengketa pajak pada setiap kasusnya dirasakan oleh Regita Paskah Pasaribu, mahasiswa Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Namun, tantangan ini justru akan meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya di bidang perpajakan.

Selama melaksanakan magang di Set. PP, banyak manfaat yang didapatkan oleh para peserta. Vidia Alifia Indriani, mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya, menyampaikan bahwa ia mendapatkan manfaat berupa pemahaman praktis dan eksplorasi minatnya tentang hukum pajak, pengembangan keterampilan, dan jaringan profesional. Senada dengan Muhammad Abiyyu Saqib, mahasiswa Akuntansi Universitas Mercu Buana, yang merasakan manfaat magang dalam meningkatkan pengetahuannya tentang ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan dan pemahaman terkait proses penyelesaian sengketa pajak.

Kegiatan Magang Kemenkeu, dalam lingkup Kementerian Keuangan maupun dalam lingkup Set. PP, salah satu tujuannya untuk membuka seluas-luasnya kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman menelisik jantung pengelolaan keuangan negara, termasuk proses penyelesaian sengketa pajak. Dengan adanya program Magang Kemenkeu ini, manfaat yang diterima bukan hanya pengalaman magang biasa, akan tetapi gerbang menuju masa depan yang gemilang. Pengetahuan akademis yang terkomposisi baik dengan pengalaman praktik lapangan, diharapkan dapat membentuk kompetensi unggul di kalangan mahasiswa/mahasiswi di masa depan sebagai penerus bangsa.

Teks: HN

Mengapa Sekolah Lagi?

*"Sebagian besar hal indah dalam hidup saya, terjadi karena
Perkawinan dan Pendidikan"*



Pada tanggal 29 Mei 2024, pukul 05.17 WIB, Sas bangun dari lalapnya. Masa lalunya baru berkunjug dalam bentuk bunga tidurnya. Masa lalu yang cukup menantang bagi sebagian besar orang. Setelah mengumpulkan kesadarannya dan menyalakan lampu, terlihat jelas kini taraf hidupnya sudah meningkat, belum kaya, tapi sudah sejahtera. Masa-masa pembelajaran di waktu lampaunya telah membuahkan hasil. Pada cermin lemarnya tertempel stiker buatannya sendiri yang berbunyi “Sebagian Besar Hal Indah Dalam Hidup Saya, Terjadi Karena Perkawinan Dan Pendidikan”. Secuplik kalimat itu juga yang mengantarnya meraih beasiswa pada tahun 2018 lalu.

Pendidikan Tinggi bagi Masyarakat

Bagi sebagian kecil orang beruntung di negeri ini, mengenyam pendidikan tinggi seperti sebuah rutinitas. Setelah tamat SMA maka otomatis akan kuliah. Adalah sebuah kewajaran bagi seseorang yang kaya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, dapat dilihat dari perspektif akses dan sumber daya. Lalu, bagaimana dengan manusia lainnya?

Menukil pernyataan seorang petinggi di negeri ini, bahwa pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan yang tidak masuk dalam wajib belajar dua belas tahun. Bagi individu yang memang merasa masih terlampau jauh jangkauannya untuk mendapatkan hal tersebut akan cenderung bergumam “Yasudahlah, seandainya pendidikan tinggi memang kebutuhan tersier, penuhi dulu kebutuhan pokoknya.” Beberapa lainnya akan tetap gigih mendapatkannya karena memiliki keinginan kuat. Namun bagi kaum *middle income*, keterjangkauannya sungguh dekat. Dan sesuatu yang sudah terlihat dalam jangkauan akan menjadi sebuah pilihan bagi orang untuk menggapainya atau tidak.

Mengapa sekolah lagi?

Jawaban singkat untuk pertanyaan di atas mungkin adalah untuk meningkatkan kapasitas diri atau memenuhi kebutuhan organisasi. Apapun jawabannya akan menunjukkan motivasi tersebut datang dari dalam diri SobatPP (intrinsik) atau dari lingkungan SobatPP (ekstrinsik).

Terdapat beberapa motivasi intrinsik seseorang untuk meraih pendidikan tinggi. **Pertama**, keinginan untuk pertumbuhan pribadi. Banyak orang memiliki dorongan kuat untuk menjadi versi terbaik dari

diri mereka sendiri. Mereka ingin terus belajar, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka. Keinginan ini berasal dari rasa ingin tahu dan hasrat untuk memahami lebih banyak tentang dunia dan diri mereka sendiri.

Kedua, kepuasan pribadi. Merasa puas dengan pencapaian dan perkembangan diri sendiri dapat menjadi motivator yang kuat. Ketika seseorang melihat kemajuan dan pencapaian mereka, perasaan kepuasan dan kebanggaan ini mendorong mereka untuk terus berusaha dan mengembangkan diri lebih jauh. Percayalah, saat sudah sampai di tujuan SobatPP akan puas dengan perjalanannya. Pengalaman ini mendorong individu untuk terus menetapkan tujuan baru dan bekerja keras untuk mencapainya, menciptakan siklus pengembangan diri yang berkelanjutan.

Ketiga, nilai dan prinsip pribadi. Orang sering termotivasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka anut. Misalnya, seseorang yang menghargai pendidikan dan pengetahuan mungkin termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru karena hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai mereka. Apalagi bila SobatPP menganut prinsip makin belajar makin lapar akan ilmu.

Keempat, tanggung jawab dan ambisi. Rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain bisa menjadi motivator internal. Memiliki tujuan hidup yang jelas dan ambisi pribadi sering kali menjadi pendorong utama untuk pengembangan diri. Orang yang memiliki visi tentang apa yang ingin mereka capai dalam hidup cenderung bekerja keras untuk mengembangkan kapasitas diri mereka agar bisa mencapai tujuan tersebut.

Kelima, kebutuhan untuk mandiri. Banyak orang termotivasi oleh keinginan untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Mengembangkan diri melalui pendidikan, keterampilan, dan pengalaman membantu mereka mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi.

Motivasi internal sangat kuat karena berasal dari kebutuhan dan keinginan yang mendalam dari dalam diri individu. Hal ini membuat seseorang lebih gigih dan tahan terhadap rintangan, karena dorongan untuk berkembang tidak tergantung pada faktor-faktor eksternal tetapi pada komitmen pribadi mereka untuk mencapai tujuan dan impian mereka. Pun bila

motivasi internal kurang menggugah SobatPP, ada banyak alasan lain yang mungkin dapat menggugah untuk belajar lebih lanjut dari motivasi eksternal.



Motivasi eksternal adalah dorongan yang berasal dari luar individu, sering kali dalam bentuk imbalan, pengakuan, atau tekanan sosial. Berikut adalah beberapa faktor motivasi eksternal yang mendorong seseorang untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi:

Pertama, peluang karier yang lebih baik. Pendidikan tinggi sering kali menjadi prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih bergengsi. Gelar yang lebih tinggi dapat membuka pintu ke berbagai peluang karier yang mungkin tidak tersedia bagi mereka yang hanya memiliki pendidikan dasar atau menengah. Sebagai contoh, PNS hanya dapat mencapai golongan pangkat tertentu bila tingkat pendidikannya telah sesuai. Pilihannya mentok atau lanjut.

Kedua, penghasilan yang lebih tinggi. Ada korelasi kuat antara tingkat pendidikan dan potensi penghasilan. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Ketiga, pengakuan sosial dan status. Memiliki gelar pendidikan tinggi dapat meningkatkan status sosial seseorang. Gelar ini sering dianggap sebagai simbol prestasi dan kompetensi, sehingga memberikan pengakuan dan rasa hormat dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Bayangkan pada undangan pernikahan SobatPP atau anak SobatPP, tertulis Prof. Dr. Fulan S.S.T., M.MGT., M.B.A, bukankah terlihat lebih membanggakan?

Keempat, tuntutan pasar kerja. Banyak pekerjaan saat ini mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu. Dengan semakin tingginya persaingan di pasar kerja, memiliki pendidikan yang lebih tinggi menjadi keharusan untuk memenuhi persyaratan pekerjaan dan meningkatkan daya saing. Coba ingat-ingat saat SobatPP mendaftar kerja kemarin, masih ada syarat pendidikan minimal kan?

Kelima, tekanan dari keluarga dan lingkungan. Motivasi eksternal ini jamak ditemui di lingkungan yang mayoritas anggotanya terpelajar. Keluarga dan masyarakat pada kalangan ini memberikan tekanan atau dorongan bagi individu untuk mengejar pendidikan tinggi. Harapan orang tua, keluarga, atau komunitas dapat menjadi motivator kuat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Apabila orang tua SobatPP memiliki gelar doktor atau master, ketahuilah bahwa mereka akan lebih bangga bila SobatPP meraih pendidikan setingkat atau bahkan melebihi mereka. Membuat bangga orang tua pasti menyenangkan.

Keenam, beasiswa. Beasiswa memainkan peran penting dalam mengatasi kendala finansial yang selama ini menjadi alasan bagi banyak orang untuk tidak melanjutkan pendidikan. Beasiswa membuka pintu kesempatan bagi individu yang berpotensi tetapi terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Apabila SobatPP memang memiliki motivasi yang kuat dan dapat menunjukkannya dalam beberapa seleksi, SobatPP akan dibiayai dan mendapatkan berbagai fasilitas penunjang. Beasiswa tidak hanya mengurangi beban keuangan, tetapi juga memberikan dukungan moral dan motivasi bagi penerimanya untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Apabila SobatPP menginginkan tips menghadapi seleksi beasiswa dapat menghubungi Subtim Pengembangan SDM Tim Perspektif, dan membaca artikel “*Sharing Beasiswa: Seberapa Pantaskah Kau Tuk Dibiayai*” pada Tcmedia edisi 120 tahun 2021.

Apabila SobatPP tergugah dengan artikel ini, segera buka laman kampus-kampus idaman SobatPP, mendaftar, lulus, lalu resapi bahwa mungkin SobatPP juga akan merasakan bahwa sebagian hal indah dalam hidup SobatPP terjadi karena pendidikan.

Teks: Shuk

SobatPP **BERANI**

Beasiswa, Belajar, dan Mengembangkan Diri

Keterlibatan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak untuk melanjutkan Pendidikan lanjut tentu juga menjadi salah satu pilihan untuk mengembangkan diri dan karir. Berikut beberapa infografis atas kegiatan tugas belajar SobatPP

Saat ini 13 pegawai Set. PP tengah menjalani tugas belajar



D III

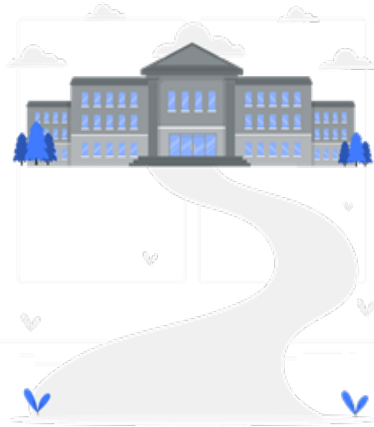


Magister



Doktoral

6
Dalam Negeri



7
Luar Negeri

Dari 13 pegawai tersebut, tersebar pada tingkat Pendidikan D3, Magister, dan Doktoral

2

Pendanaan Ministerial Scholarship

Pendanaan tugas belajar yang dilaksanakan pegawai Set. PP berasal dari LPDP, Beasiswa Kemenkeu (Ministrial), dan STAN

9 LPDP



2
STAN

Semoga lancar untuk studi SobatPP sekalian!

“

Dalam persidangan di Pengadilan Pajak dibutuhkan paling sedikit dua alat bukti untuk menentukan pembuktian itu sah. Hal ini sejalan dengan *adagium unus testis nullus testis*, yang artinya satu alat bukti bukan bukti.”

Bukti Pemeriksaan dalam Persidangan

Pengadilan pajak adalah lembaga peradilan khusus yang berfungsi menyelesaikan sengketa perpajakan antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan utamanya adalah untuk memberikan wadah yang independen dan adil bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam masalah perpajakan. Umumnya jenis sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak ialah terkait dengan sengketa yuridis maupun sengketa non yuridis. Adapun yang dimaksud sengketa yuridis ialah sengketa yang membahas kaitan sengketa perpajakan yang terkait dengan undang-undang atau dasar hukum yang disengketakan. Lebih lanjut, sengketa non yuridis ialah sengketa yang terkait dengan koreksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas jenis pajak tertentu.

Dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim umumnya akan mengonfirmasi terkait dengan jenis sengketa guna memfokuskan diskusi yang akan diperbincangkan dalam proses persidangan. Terkait dengan salah satu proses yang dilalui dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak ialah pembuktian yang erat kaitannya dengan sengketa non yuridis. Dalam tahapan pembuktian ini, para pihak yang terlibat (baik Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak) akan menyerahkan berbagai jenis alat bukti serta memberikan penjelasan dalam persidangan untuk meyakinkan hakim atau atas dalil yang disampaikan dalam persidangan.

Pembuktian yang dilakukan di Pengadilan Pajak telah diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Berdasarkan pasal a quo, Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian bebas adalah asas peradilan administrasi yang berarti hakim tidak terikat pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hakim dapat menguji aspek lainnya di luar sengketa. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan beban pembuktian berserta penilaian pembuktian. Pembuktian yang dimaksud meliputi hal yang sifatnya khusus.

Dalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Pajak, terdapat 5 (lima) jenis alat bukti antara lain: surat atau tulisan; keterangan ahli; keterangan para saksi; pengakuan para pihak; pengetahuan hakim. Dalam praktiknya, alat bukti yang diserahkan umumnya minimal 2 bukti atau sesuai dengan permintaan pembuktian bebas yang dimintakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Adapun yang dimaksud dengan surat atau tulisan adalah alat bukti yang terdiri dari akta otentik, surat Keputusan yang diterbitkan pejabat berwenang ataupun surat lain yang erat kaitannya dengan banding dan gugatan yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dalam menyampaikan surat tersebut (baik itu wajib pajak atau pengurus pajak atau kuasa hukum yang telah menerima kuasa dari wajib pajak).

Selanjutnya, keterangan ahli. Alat bukti ini merupakan pendapat orang yang telah di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa ahli dan saksi adalah jenis alat bukti yang berbeda dimana ahli terkait dengan pengalaman dan pengetahuannya. Untuk alat bukti berupa keterangan ahli dapat sifatnya diajukan oleh Wajib Pajak ataupun pihak DJP ataupun oleh Majelis Hakim yang dimana pengajuan permohonan tersebut harus telah disetujui oleh Majelis Hakim. Dalam persidangan, keterangan

ahli ini akan disampaikan secara verbal (lisan) yang dicatatkan dalam keterangan tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

Ketiga, keterangan saksi. Alat bukti ini merupakan alat bukti berupa keterangan yang berkaitan dengan hal yang dilihat, dialami dan didengar ataupun dilakukan sendiri oleh saksi. Umumnya saksi yang dimaksud ialah individu yang berkecimpung dalam perusahaan ataupun kantor pelayanan pajak yang sedang bersengketa. Dalam hal ini, saksi pun akan disumpah oleh rohaniawan sebagaimana para ahli. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan merupakan informasi yang sebenarnya.

Adapun salah satu alat bukti keempat adalah pengakuan para pihak yang merupakan alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh para pihak. Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim Majelis atau Hakim Tunggal.

Terakhir, alat bukti berupa pengetahuan hakim. Alat bukti ini merupakan hal-hal yang oleh hakim diketahui dan diyakini kebenarannya. Pengetahuan hakim tentunya akan memengaruhi penilaian hakim terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Umumnya alat bukti ini dikonfirmasi dalam diskusi yang terjadi antara Majelis Hakim dan para pihak guna memastikan ruang lingkup sengketa pajak yang disidangkan.

Dalam persidangan di Pengadilan Pajak dibutuhkan paling sedikit dua alat bukti untuk menentukan pembuktian itu sah. Hal ini sejalan dengan *adagium unus tetis nullus tetis*, yang artinya satu alat bukti bukan bukti. Apabila proses pembuktian di persidangan sudah dilakukan, selanjutnya hakim akan memutus sengketa pajak yang terjadi.

Teks: Tirta

Peringatan HUT ke-22 Pengadilan Pajak

Seminar Motivasi

Transformasi untuk

Pengadilan Pajak yang Lebih Baik



Tax Court People's Choice Tahun 2024

Tax Court People's Choice Tahun 2024 merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pimpinan Pengadilan Pajak kepada hakim, pejabat, pelaksana, dan tenaga pendukung terpilih. Pemberian Penghargaan ini telah melalui proses pemilihan yang melibatkan seluruh hakim dan Pegawai Pengadilan Pajak dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti integritas, komitmen, kedisiplinan, kerjasama, dan etika serta inovasi-inovasi yang diciptakan yang berdampak positif dalam peningkatan kinerja dan membangun citra Pengadilan Pajak. Pemberian Tax Court People's Choice ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi seluruh hakim, pejabat, pelaksana, dan tenaga pendukung agar terpacu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan pelayanan bagi Pengadilan Pajak dan masyarakat.

Berikut nama para pemenang Tax Court People's Choice Tahun 2024 berdasarkan enam kategori:

1. Hakim pengadilan Pajak teladan: Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., M.H., CA.
2. Pejabat Inspiratif: Budi Setyawan M.N.Y., AK., M.A.
3. Pelaksana Inovatif: Dicky Dwi Rahardjo, S.E.
4. Cleaning Service Paling Rapi: Rohmatullah
5. Tenaga Pendukung Tersigap: Sudadi
6. Security Paling Ramah: Sukian

Pada kesempatan kali ini Tim TCMedia berkesempatan untuk mewawancarai pemenang Tax Court People's Choice Tahun 2024 untuk kategori Pelaksana Inovatif Tahun 2024, Cleaning Service

Paling Rapi Tahun 2024, Tenaga Pendukung Tersigap Tahun 2024, dan Security Paling Ramah Tahun 2024.

Dicky Dwi Rahardjo, S.E.

Dicky merupakan pegawai yang telah mengabdikan di Sekretariat Pengadilan Pajak kurang lebih selama lima belas tahun. Penghargaan ini merupakan penghargaan pertama yang ia terima. "Saya sangat tersanjung dan merasa dicintai oleh senganap punggawa di Pengadilan Pajak, terpilih menjadi pemenang untuk kategori Pegawai Inovatif merupakan suatu kehormatan bagi saya terlebih nominee lainnya yang memiliki inovasi-inovasi luar biasa seperti Mas Brian dan Mas Ridwan," ucap Dicky.

Dicky merupakan salah satu pegawai yang aktif di berbagai tim. Ia terlibat dalam Tim Transisi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung, Tim Kerja e-Tax Court, Tim Manajemen Berkas, Tim Analisis Beban Kinerja, Panitia Acara Puncak Harlah Pengadilan Pajak Ke-22, dan Tim Perspektif. Selain tim kerja, ia juga aktif dalam kegiatan lainnya yang mungkin ada hubungannya dengan kesehatan mental dalam bekerja, contohnya ia menginisiasi adanya turnamen e-Sport dan nonton bareng film di luar jam kerja bersama dengan teman-teman lainnya. Memperoleh ilmu baru merupakan salah satu motivasi Dicky terlibat dalam berbagai kegiatan. "Saya memperoleh banyak ilmu, contohnya public speaking, editing gambar dan video serta mendapatkan perspektif baru dalam melihat suatu masalah" kata Dicky.

Harapan Dicky terhadap Pengadilan Pajak kedepannya adalah budaya awkward berkomunikasi kepada pimpinan atau rekan kerja lainnya dapat dihilangkan dengan mulai mengurangi prasangka-prasangka negatif dan belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Kita juga harus belajar bersyukur kepada organisasi karena organisasi telah berusaha memberikan yang terbaik untuk kita sehingga kita bisa membalas dengan cara memberikan yang terbaik juga untuk organisasi. Selain itu perlu adanya kegiatan yang menumbuhkan engagement dengan kantor

beserta pegawainya seperti *Capacity Building*.

Rohmatullah

Pria yang akrab disapa Rohmat ini lahir pada tahun 1994 dan saat ini berdomisili di Bogor. Ia bergabung di Pengadilan Pajak pada tahun 2019. "Saya tertarik menjadi CS karena saya sangat suka kerapian. Saya terbiasa dengan hidup rapi sehingga ketika mendengar ada lowongan CS di Pengadilan Pajak, saya tertarik untuk mendaftar" kata Rohmat. Selain suka kerapian, ia juga memiliki hobi berolahraga seperti futsal dan badminton.

Penghargaan ini merupakan penghargaan pertama yang diterima Rohmat. "Saya sangat senang. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Pengadilan Pajak dan rekan-rekan seperjuangan atas dukungannya sehingga saya bisa mendapatkan penghargaan ini. Mohon doanya agar saya semakin baik dalam bekerja dan semoga rekan-rekan seperjuangan juga termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi," ucap Rohmat. Rohmat memang CS yang dikenal konsisten dalam kebersihan. Ia membuat jadwal pembersihan rutin contohnya melakukan pengecekan kebersihan di setiap pagi dan setelah waktu sholat dhuha.

Pesan Rohmat untuk seluruh pegawai Pengadilan Pajak yaitu jangan bosan untuk mengingatkan kepada kebaikan. Jika ia dan teman-teman tenaga pendukung melakukan kesalahan dan kekhilafan silahkan disampaikan untuk menjadi bahan perbaikan bagi mereka. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pegawai Pengadilan Pajak merupakan nilai plus untuk ia dan teman-temannya.

Sudadi

Sudadi lahir di Ngawi, tanggal 27 September 1969. Ia bekerja di Sekretariat Pengadilan Pajak sejak Januari 2010. Melayani pegawai dengan sepenuh hati dan semangat merupakan slogan yang ia miliki. "Saya merasa senang dan nyaman bekerja di Pengadilan Pajak, pegawai menganggap saya sebagai keluarga sendiri sehingga saya ingin bekerja memberikan yang terbaik untuk semua pegawai" kata Sudadi.



“Saya merasa senang dan tidak menyangka mendapatkan penghargaan ini. Untuk kedepannya akan saya tingkatkan lagi kinerja untuk Pengadilan Pajak” ucap Sudadi atas penghargaan ini. Ucapan terima kasih ia haturkan juga kepada Pimpinan Pengadilan Pajak karena ia dan rekan-rekan tenaga pendukung lainnya diikutsertakan menjadi anggota koperasi sehingga ketika mereka membutuhkan uang mendadak, koperasi sangat membantu.

Pesan Sudadi untuk teman-teman tenaga pendukung yaitu diharapkan teman-teman tenaga pendukung selalu bersungguh-sungguh dan giat dalam bekerja dan semoga rekan-rekan lebih semangat dan bisa mengatur waktu dalam bekerja.

Sukian

Bapak dua anak ini lahir pada tanggal 13 April 1985. Sukian bergabung di Pengadilan Pajak kurang lebih selama sembilan tahun. Ia selalu bekerja melayani dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan, tulus, ikhlas, dan sabar. Dalam mengatasi pekerjaan satpam yang memerlukan kerja fisik yang berat, ia mengatasinya dengan cara 3S dan 1L yaitu serius, santai, selesai, dan laporkan!

Di kalangan Pegawai Pengadilan Pajak, Sukian dikenal sebagai satpam yang ramah. “Saya pribadi selalu ingat dengan apa yang telah disampaikan oleh pembina saya, selain menjaga keamanan, saya diminta juga untuk memberikan kenyamanan dengan mengedepankan estetika, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada pimpinan dan seluruh Pegawai Pengadilan Pajak” ucap Sukian. Hal inilah yang mengantarkan Sukian mendapatkan penghargaan Security Paling Ramah Tahun 2024.

Atas penghargaan tersebut, Sukian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh Pegawai Pengadilan Pajak atas perhatiannya kepada ia dan rekan-rekan satpam selama ini, mohon dibukakan pintu maaf apabila dalam pelaksanaan tugas ada salah dan ketidaknyamanan yang mereka lakukan karena mereka hanya menjalankan tugas sesuai SOP dan perintah dari pimpinan. Ia berharap semoga ia dan rekan-rekan satpam bisa menjadi satpam organik seperti teman-teman di kantor pusat.

Teks: Mega



Tugas Belajar Part 2:

Kisah Studi Arifin dan Mamet

Cerita Arifin di The University of Queensland

Menghadapi Homesick: Sebuah Awal Perjalanan

Ketika saya pertama kali meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan studi di luar negeri, perasaan homesick sudah menghampiri pada beberapa minggu pertama tinggal di Australia. Tidak hanya rindu keluarga, tetapi juga makanan dan kebiasaan sehari-hari di tanah air. Namun, perasaan itu justru menjadi motivasi untuk lebih cepat beradaptasi dan menikmati pengalaman baru di negeri orang.

Mengapa Queensland University?

Setelah memutuskan untuk melanjutkan studi di luar negeri, saya memilih untuk mengambil jurusan *Master of Governance and Public Policy* di The University of Queensland (UQ), Brisbane. Reputasi universitas dalam bidang kebijakan publik sangat baik, dan lingkungan akademis yang mendukung serta suasana kota yang nyaman menjadi pertimbangan penting. Saya menerima beasiswa LPDP yang sangat membantu dalam menutupi biaya kuliah dan biaya hidup selama di Australia. Proses persiapannya pun menantang, membutuhkan waktu total sekitar satu tahun, termasuk persiapan bahasa Inggris.

Pekerjaan dan Studi: Sebuah Inspirasi

Apa yang saya pelajari di UQ sejauh ini sangat berkesan. Sebagai gambaran umum, di sini saya mempelajari ilmu dasar mengenai proses kebijakan publik, seperti ilmu politik dan hubungan internasional sebelum mempelajari ilmu kebijakan publik. Dari pembelajaran tersebut, sangat membuka pemikiran saya dan membuka ruang perspektif baru dalam membahas sebuah issue yang sedang dihadapi sebuah negara, sehingga langkah solusi kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Tips untuk Melanjutkan Kuliah

Bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan kuliah dan mendapatkan beasiswa, saya sangat menyarankan untuk memetakan issue yang tengah dihadapi baik pada instansi maupun organisasi Kemenkeu secara umum. Dari issue tersebut, akan memunculkan kebutuhan kompetensi apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tentunya, jurusan yang diambil juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian organisasi tempat bekerja, dengan harapan dapat berkontribusi dalam melakukan pekerjaan nantinya.

Dukungan Keluarga dan Teman

Dukungan dari keluarga dan teman-teman sangat berperan penting dalam perjalanan akademis saya. Mereka selalu memberikan semangat dan dorongan, terutama di saat-saat sulit. Komunikasi yang baik dengan keluarga dan teman di Indonesia melalui teknologi seperti *video call* sangat membantu mengurangi rasa rindu dan *homesick*.

Pengalaman Paling Berkesan

Bahasa di kelas dan sehari-hari yang berbeda adalah tantangan tersendiri, termasuk harus beradaptasi dengan teman-teman kelas yang memiliki logat yang sulit untuk dipahami. Selain itu, ada juga kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, seperti kedai kopi yang tutup lebih awal, yaitu jam 6 sore. Saya juga sangat merindukan bumbu dapur Indonesia yang mudah dibeli di tukang sayur. Saya juga merindukan *street food* yang tidak mudah ditemukan di Brisbane. Untuk mengobati rasa rindu, saya terkadang membuat olahan jajanan nusantara sendiri seperti martabak manis, cireng, bakso, batagor, dan sebagainya.

Adaptasi dengan Sistem Pendidikan

Adaptasi dengan lingkungan dan sistem pendidikan di Australia juga merupakan tantangan tersendiri. Sistem pembelajaran di UQ berbeda dengan di Indonesia, salah satunya adalah adanya rekaman kelas yang bisa diunduh langsung dari laman. Hal ini sangat membantu dalam mengulang materi yang belum dipahami. Para dosen di sini juga sangat santai dan mendukung, sehingga membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan.

Kegiatan di Luar Kelas

Selain fokus pada studi, saya juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Saya terlibat dalam kepanitiaan acara Pesta Rakyat untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA). Saya juga mengikuti kelas *dance* seperti *street groove* dan *break dance*, serta menjadi member gym kampus. Semua kegiatan ini membantu saya tetap sehat dan menjaga keseimbangan antara studi dan kehidupan sosial.

Mengatur Waktu: Kunci Sukses di Luar Kampus

Mengatur waktu antara studi dan aktivitas di luar kampus adalah hal yang sangat penting. Saya selalu membuat jadwal harian yang terstruktur dan berusaha disiplin dalam menjalankannya. Prioritas utama tentu adalah akademis, namun tidak lupa untuk menyisihkan waktu untuk beristirahat dan bersosialisasi.

Cerita Mamet di Columbia University

Homesick Setelah Hampir Setahun

Sudah hampir setahun tinggal jauh dari Indonesia, tentu mulai merasa *homesick*. Namun, semangat untuk mengejar ilmu dan meraih impian tetap menjadi motivasi utama untuk bertahan di negeri orang.

Kuliah di Columbia University

Saat ini saya melanjutkan kuliah di Columbia University School of Professional Studies dengan jurusan *Master of Science in Human Capital Management*. Lokasi strategis di New York City, kurikulum yang sesuai, reputasi universitas, dan rekomendasi alumni menjadi alasan memilih Columbia. Studi ini dibiayai sepenuhnya oleh beasiswa LPDP Targeted PNS, TNI, dan POLRI. Jurusan yang saya ambil sangat berhubungan dengan tugas pekerjaan yang terkait dengan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalaman praktis di dunia kerja sering saya kaitkan dalam tugas akademik dan diskusi kelas, memperkaya proses belajar dan membangun kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi praktisi HCM yang andal.

Saran untuk Melanjutkan Kuliah

Melanjutkan studi tanpa harus berhenti dari pekerjaan adalah *privilege* yang harus dimanfaatkan. Pengalaman kerja dan tekad untuk melanjutkan pendidikan tinggi adalah modal berharga. Prinsip '*at your own pace, by your own means*' membantu menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan *progress* pendidikan tinggi.

Dukungan Keluarga dan Teman

Keluarga dan teman yang mendukung sangat penting dalam perjalanan pendidikan ini. *Reach out* kepada orang terdekat adalah hal penting untuk menjaga kesehatan mental dan menghindari *burnout*.



Pengalaman Studi yang Berkesan

Menjadi bagian dari international student dengan perspektif unik sangat berkesan. Awalnya, saya menghadapi *impostor syndrome*, tetapi konsep *Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)* yang dijunjung tinggi membantu saya mengatasinya. Saya juga belajar pentingnya *speaking up* dalam menyuarakan *concern* untuk didengar dan dipertimbangkan.

Adaptasi dengan Lingkungan dan Sistem Pendidikan

Beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pendidikan yang berbeda memerlukan strategi yang tepat. Tantangan terbesar adalah menyeimbangkan tanggung jawab studi dan *well-being*. Strategi saya adalah menjaga ekspektasi dan *always expect the unexpected*, serta mengelola waktu dengan baik untuk tetap memenuhi tuntutan akademik dan personal *well-being*. *Time management is absolutely key here, and you'd better make the most out of your limited time while you are here by doing the things that keep you going along the journey.*

Perbedaan Metode Pengajaran

Di sini, metode belajar berbeda dengan di Indonesia. Mahasiswa dituntut hadir dengan

persiapan matang, membaca materi sebelum kelas, dan aktif dalam diskusi. Dosen lebih berperan sebagai fasilitator, seringkali dengan latar belakang sebagai praktisi industri, memberikan *real-world insights*.

Interaksi dengan Mahasiswa Internasional

Interaksi dengan mahasiswa internasional memperkaya proses pembelajaran. Latar belakang yang beragam membawa perspektif unik ke dalam diskusi kelas. Komunikasi yang baik sangat penting, terutama untuk mengelola *time-commitment* antara *full-time* dan *part-time students*.

Kegiatan Ekstrakurikuler dan Organisasi Mahasiswa

Selain akademik, saya menghadiri seminar dan *conference*, serta *social mixer events* untuk berjejaring. Saya juga menjadi *volunteer* dalam *international running events* sebagai bentuk *community service*.

Mengatur Waktu antara Studi dan Aktivitas Lain

Mempelajari silabus sejak awal semester, *update academic calendar* dan *personal calendar* secara berkala, membuat waktu untuk *both study and quality time*, dan tetap aktif secara fisik dan mental adalah kunci untuk mengatur waktu antara studi dan aktivitas lain di luar kampus. Ini membantu menyelesaikan *to-do-list* dan menikmati proses belajar di Columbia University. Pengalaman studi di Columbia University memperkaya pengetahuan akademik dan mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, *self-management*, dan pentingnya *support system* yang kuat. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan studi dan meraih impian mereka.

Teks: rn



Ide Inovasi “Satu Shortlink” untuk Satu Kemenkeu

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, keamanan informasi menjadi isu yang sangat penting bagi setiap instansi pemerintahan. Menghadapi tantangan ini, dalam Kompetisi Ide Inovasi Sekretariat Jenderal Tahun 2023, Ridwan Firmansyah (salah satu pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak) mengusung ide inovasi yang bertajuk “Satu Shortlink untuk Satu Kemenkeu”. Ide inovasi tersebut berupaya untuk mengatasi masalah dengan mengembangkan layanan shortlink yang lebih aman dan terkontrol. Ide ini, atau yang disebut Satu Shortlink, muncul sebagai solusi atas kebiasaan pegawai yang sering kali menggunakan layanan shortlink pihak ketiga secara kurang tepat, yang pada akhirnya menimbulkan potensi ancaman keamanan informasi.

Latar Belakang Masalah

Pegawai Kementerian Keuangan sering kali menggunakan layanan shortlink pihak ketiga untuk mempermudah akses dan distribusi informasi. Namun, penggunaan layanan tersebut tanpa pengawasan yang memadai menimbulkan berbagai risiko keamanan. Ancaman yang timbul meliputi kebocoran data, jejak data yang tidak diinginkan, dan ancaman phishing. Kebocoran data dapat terjadi

ketika informasi sensitif disebarluaskan melalui tautan yang tidak aman, sementara jejak data yang tersebar luas di internet dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan jahat. Ancaman *phishing* juga meningkat karena tautan yang dibuat melalui layanan pihak ketiga bisa saja dialihkan ke situs yang berbahaya.

Solusi Inovatif: Satu Shortlink

Layanan Satu Shortlink ini dirancang dengan berbagai fitur keamanan yang canggih untuk memastikan keamanan informasi yang dibagikan. Beberapa fitur utama dari Satu Shortlink meliputi:

1. Menonaktifkan Tautan Secara Otomatis: Tautan yang dibuat akan dinonaktifkan secara otomatis saat tidak digunakan lagi, sehingga meminimalisasi risiko kebocoran data jika tautan tersebut tersebar tanpa pengawasan.
2. Pembatasan Pencarian di Google: Tautan yang dibuat melalui Satu Shortlink akan dibatasi agar tidak muncul dalam hasil pencarian di Google, sehingga mengurangi jejak data yang dapat diakses publik.

Usulan Tampilan yang diajukan

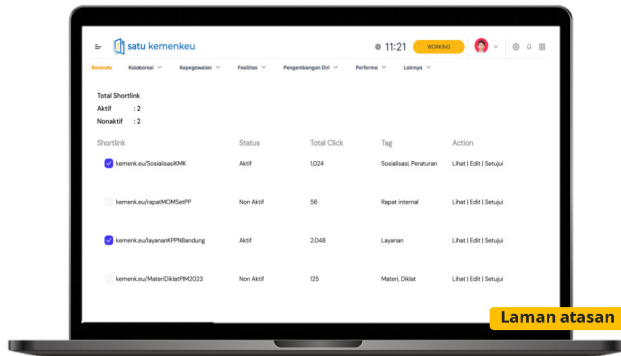


Figure 1 Mockup Laman Atasan

Usulan Tampilan yang diajukan

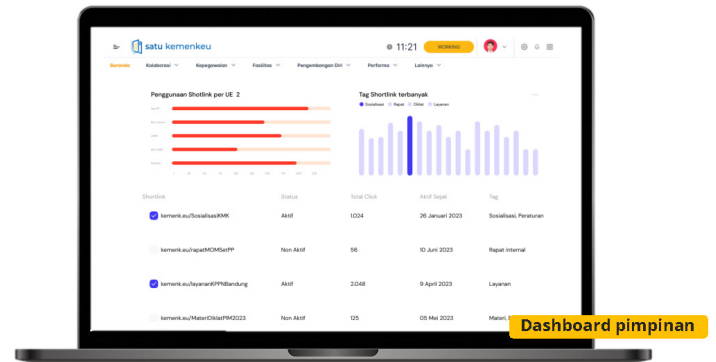


Figure 2 Mockup Dashboard Pimpinan

3. Persetujuan Berjenjang: Setiap pembuatan shortlink memerlukan persetujuan dari atasan, memastikan bahwa tautan yang dibuat telah melalui proses verifikasi dan validasi.

Pemenang Kompetisi Ide Inovasi Sekretariat Jenderal Tahun 2023

Ide inovasi Satu Shortlink berhasil meraih posisi sebagai salah satu pemenang dalam Kompetisi Ide Inovasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2023. Keberhasilan ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi ini dalam menjaga keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan menunjukkan perhatian dan komitmen pimpinan terhadap pentingnya keamanan informasi.

Ide inovasi ini telah di presentasikan di hadapan Bapak Heru Pambudi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan para jajaran eselon 2 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan mendapat sambutan positif. Dukungan penuh dari para pimpinan ini menunjukkan komitmen Kementerian Keuangan dalam meningkatkan keamanan informasi.

Proses Pengembangan dan Harapan Masa Depan

Saat ini, inovasi Satu Shortlink sedang dalam proses inkubasi dan akan dikembangkan lebih lanjut oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek). Pengembangan ini mencakup peningkatan fitur keamanan, uji coba, dan implementasi sistem secara menyeluruh di seluruh unit Kementerian Keuangan.

Diharapkan, dengan adanya Satu Shortlink, Kementerian Keuangan dapat meningkatkan keamanan informasi di era digital ini. Terlebih lagi, dengan tren ancaman siber yang terus meningkat, inovasi seperti ini sangat diperlukan untuk melindungi data dan informasi penting dari berbagai risiko. Semoga inovasi ini memberikan dampak positif yang signifikan dan menjadi langkah maju dalam upaya perlindungan data serta keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Inovasi ini diharapkan juga dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintahan lainnya dalam mengimplementasikan teknologi yang aman dan efisien.

Teks: Ridwan

It's **TACO** Time!

TERUS BELAJAR



Kenapa ya disini
wajib belajar cuma
12 tahun?



Hmm, iya juga ya..
Apa artinya setelah 12 tahun
kita berhenti belajar?



Ya kan?
Harusnya wajib belajar itu
seumur hidup.

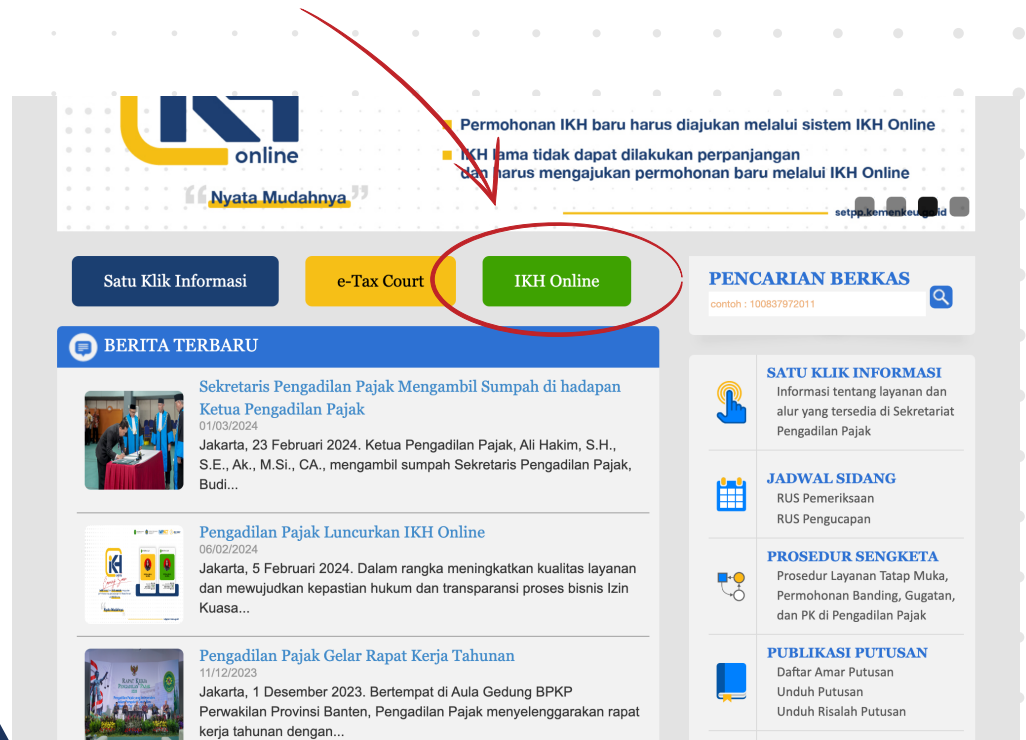


Setuju!
Untungnya organisasi kita
punya prinsip terus belajar.
Jadi kita juga harus inline
dengan terus meningkatkan
kompetensi kita.
Semangat!

@ridwan firmansyah



- Permohonan IKH baru harus diajukan melalui sistem IKH Online
- IKH lama tidak dapat dilakukan perpanjangan dan harus mengajukan permohonan baru melalui IKH Online
- Buka web setpp (setpp.kemenkeu.go.id)
- Klik ikon IKH Online disamping ikon e-Tax Court



Mengalami kendala? Hubungi



081211007510

setpp.kemenkeu.go.id